

# ANALISIS RASIO KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016-2020

Arif Budiarto  
Statistisi Diskominfo Kab. Magelang

## Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kinerja keuangan dari Pemerintah Kabupaten Magelang periode 2016-2020. Analisa kinerja keuangan ini dilakukan dengan menggunakan analisa rasio seperti derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan, rasio efektif pendapatan, rasio belanja langsung dibandingkan total belanja, rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja dan rasio pertumbuhan. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa rasio tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Magelang memiliki hubungan yang instruktif. Dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya, Pemerintah Kabupaten Magelang mempunyai rasio efektivitas sebesar 97,37%. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Magelang masih memprioritaskan anggarannya dalam belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung.

**Kata kunci:** analisa rasio, kinerja keuangan

## PENDAHULUAN

Dengan diimplementasikannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian menjadi UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, era otonomi daerah dimulai di Indonesia. Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan otonomi daerah yang dimilikinya, daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola daerahnya. Daerah harus menjadi lebih mandiri sehingga mampu mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah pusat. Selain itu, salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi.

Menurut UU No. 32 tahun 2004, definisi dari desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, Kabupaten Magelang

mengemban tanggung jawab untuk menjadi lebih mandiri dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat bahkan masyarakat Kabupaten Magelang sendiri. Pada era otonomi daerah, terjadi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan cerminan dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu. APBD dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan. (Arthaingan, 2016)

Halim (2007) mengungkapkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan Pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah tersebut perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel sehingga diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pusat.

Pemerintah daerah juga memiliki fleksibilitas dalam menggunakan dananya sesuai dengan aturan yang berlaku (Syamsi, 1986). Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah membantu memperbaiki kinerja pemerintah, mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan, serta mewujudkan akuntabilitas publik. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut adalah dengan melakukan analisis laporan keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan (Mahmudi, 2007).

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam hal ini yang menjadi rumusan permasalahan adalah : bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magelang selama lima tahun terakhir (tahun 2016-2020) dengan menggunakan analisis derajat kemandirian, rasio kemandirian, efektifitas dan efisiensi

PAD, rasio belanja langsung terhadap total belanja, rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja, dan rasio pertumbuhan.

## **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian “Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016-2020” adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magelang selama lima tahun terakhir (2016-2020) dengan analisis derajat kemandirian, rasio kemandirian, efektifitas dan efisiensi PAD, rasio belanja langsung terhadap total belanja, rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja, dan rasio pertumbuhan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten Magelang dengan pengambilan data dari BPPKAD Kabupaten Magelang sebagai pengelola keuangan pemerintah Kabupaten Magelang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang ada. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah kompilasi produk administrasi data dari perangkat daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Magelang tahun 2016-2020 serta data pendukung lainnya yang bersumber dari Kabupaten Magelang Dalam Angka yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang.

Tahap-tahap analisis laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2010–2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menghitung derajat kemandirian
2. Menghitung rasio kemandirian keuangan daerah
3. Menghitung rasio efektivitas dan efisiensi daerah
4. Menghitung rasio belanja langsung dan tidak langsung
5. Menghitung rasio pertumbuhan

## **DASAR TEORI**

### **I. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan.

1. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - b. Dana Perimbangan
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
2. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran. Kelompok belanja terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai
  - b. Belanja Barang
  - c. Bunga
  - d. Subsidi
  - e. Hibah
  - f. Bantuan sosial
  - g. Belanja modal
  - h. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
  - i. Belanja tak terduga
3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup hal-hal berikut ini :
  - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya
  - b. Pencairan dana cadangan
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - d. Penerimaan pinjaman
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Pengeluaran pembiayaan mencakup :

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penyertaan modal pemerintah daerah, termasuk investasi nirlaba pemerintah daerah
- c. Pemberian pinjaman

## **II. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Halim (2007) kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis dan efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio

keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002).

Menurut Mahmudi (2010) terdapat beberapa analisis rasio didalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut :

a. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam peyelenggaraan desentralisasi.

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Rasio Kemandirian dihitung dengan cara perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi dan Pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi dan Pinjaman}}$$

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat dapat ditampilkan dalam Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25 –50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2007)

c. Rasio Efektivitas

Menurut Mahsun (2006), rasio efektivitas diukur dengan :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}}$$

### Efektivitas Keuangan Daerah

Efektivitas Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)
Tidak Efektif	$X < 100\%$
Efektif Berimbang	$X = 100\%$
Efektif	$X > 100\%$

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya untuk memperoleh pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}$$

### Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi Keuangan Daerah	Rasio Efisiensi (%)
Tidak Efisien	$X > 100\%$
Efisien Berimbang	$X = 100\%$
Efisien	$X < 100\%$

Sumber : Moh.Mahsun, 2006

#### d. Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Menurut Mahmudi (2010) analisis proporsi belanja langsung dan tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas) sedangkan belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, sebab belanja langsung sangat mempengaruhi output kegiatan

Secara sederhana rasio tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

#### e. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*Growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode.

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - (X_n - 1)}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - 1}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan } X_n - (X_n - 1)}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan } X_n - 1}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Belanja } X_n - (X_n - 1)}{\text{Realisasi Penerimaan Belanja } X_n - 1}$$

## PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai luas 108.573 ha atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Magelang mempunyai 21 kecamatan dan terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kajoran (83,41 km<sup>2</sup>), sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Ngluwar (22,44 km<sup>2</sup>).

Wilayah Kabupaten Magelang berbatasan dengan wilayah kabupaten lain, yaitu:

- Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali
- Sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Provinsi DIY
- Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo
- Di Tengah : Kota Magelang

Kabupaten Magelang merupakan wilayah yang sangat strategis . Secara geografis Kabupaten Magelang terletak pada posisi 110<sup>0</sup>01'51"- 110<sup>0</sup>26'58" Bujur Timur dan 7<sup>0</sup>19'13"- 7<sup>0</sup>42'16" Lintang Selatan. Dengan posisi ini, Kabupaten Magelang terletak di tengah pulau Jawa, tepatnya di persilangan lalu lintas ekonomi dan wisata antara Semarang-Magelang- Yogyakarta dan Purworejo-Temanggung.

Kabupaten Magelang juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) terkait Kabupaten Magelang adalah:

1. Kawasan Solo-Selo-Borobudur yang merupakan kawasan KSP dari sudut kepentingan ekonomi

2. Kawasan Candi Borobudur merupakan kawasan KSP dari sudut kepentingan sosial budaya
3. Kawasan Taman Nasional Merapi dan Kawasan Taman Nasional Merbabu sebagai kawasan KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Perekonomian Kabupaten Magelang yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha maupun berdasarkan pengeluaran. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang cenderung naik dari tahun ke tahun. Nilai PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 32,45 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan berkisar 0,04 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 32,49 triliun rupiah. Turunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh menurunnya produksi pada sebagian besar lapangan usaha sebagai dampak pandemi COVID-19.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2016- 2020), struktur perekonomian Kabupaten Magelang didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: industri pengolahan; pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; konstruksi; dan jasa pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Magelang.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Magelang pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan, yaitu mencapai 22,38 persen (angka ini meningkat dari 22,08 persen di tahun 2016). Selanjutnya lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 21,31 persen (turun dari 22,92 persen di tahun 2016), disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 13,27 persen (menurun dari 13,43 persen di tahun 2016). Berikutnya, lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,33 persen (naik dari 9,23 persen di tahun 2016) dan lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 6,53 persen.

Pandemi COVID-19 yang terjadi di sepanjang tahun 2020 secara nyata mempengaruhi kondisi perekonomian di Kabupaten Magelang. Di antara kelima lapangan usaha dominan, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; lapangan usaha industri pengolahan; serta lapangan usaha Jasa Pendidikan kontribusinya naik. Sebaliknya, lapangan usaha konstruksi dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor peranannya terlihat menurun.

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2015-2020 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6 013,39	6 201,99	6 550,44	6 747,26	6 914,81
B	Pertambangan dan Penggalian	1 175,20	1 276,59	1 374,84	1 449,94	1 511,36
C	Industri Pengolahan	5 793,00	6 175,68	6 635,45	7 131,88	7 264,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12,56	14,28	15,51	16,40	16,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,34	22,96	24,28	25,81	27,93
F	Konstruksi	2 421,24	2 629,47	2 898,45	3 133,13	3 027,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3 523,00	3 842,38	4 119,08	4 455,80	4 306,14
H	Transportasi dan Pergudangan	881,27	949,30	1 013,87	1 119,98	847,59
I	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	1 086,21	1 167,42	1 258,72	1 379,38	1 274,04
J	Informasi dan Komunikasi	820,44	968,72	1 091,71	1 230,34	1 425,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	710,41	785,13	844,87	896,65	913,54
L	Real Estate	483,34	527,30	567,59	606,44	608,64
M,N	Jasa Perusahaan	63,49	71,85	81,15	91,95	87,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	941,68	997,56	1 039,69	1 098,36	1 100,03
P	Jasa Pendidikan	1 527,05	1 710,40	1 891,21	2 086,41	2 118,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	208,75	231,38	254,58	276,82	307,86
R,S,T,U	Jasa Lainnya	549,98	611,44	678,01	744,25	702,20
<b>PDRB KABUPATEN MAGELANG</b>		<b>26 232,35</b>	<b>28 183,85</b>	<b>30 339,47</b>	<b>32 490,80</b>	<b>32 454,72</b>

Catatan :

\*) angka sementara

\*\*) angka sangat sementara

Sumber : BPS Kabupaten Magelang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro ekonomi untuk mengetahui kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun

waktu tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Magelang (milyar rupiah), 2016-2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4 245,74	4 352,89	4 456,86	4 492,19	4 499,15
B	Pertambangan dan Penggalan	774,49	809,46	836,42	876,07	894,94
C	Industri Pengolahan	4 238,43	4 445,15	4 682,71	4 966,92	4 952,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,99	12,58	13,26	13,99	14,25
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,06	20,40	21,51	22,46	22,99
F	Konstruksi	1 904,58	2 027,74	2 148,79	2 253,39	2 169,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 839,00	3 020,27	3 165,17	3 351,23	3 201,37
H	Transportasi dan Pergudangan	777,89	825,56	876,76	951,71	694,83
I	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	824,43	876,85	940,61	1 017,36	936,02
J	Informasi dan Komunikasi	894,63	1 014,06	1 143,53	1 273,71	1 473,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	539,88	572,15	595,50	617,95	628,13
L	Real Estate	426,19	453,89	476,87	503,96	502,64
M,N	Jasa Perusahaan	50,32	55,00	60,45	66,47	61,74
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	698,85	716,81	738,66	766,58	757,22
P	Jasa Pendidikan	1 030,49	1 109,54	1 200,01	1 290,97	1 288,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	160,13	174,78	189,95	202,89	219,52
R,S,T,U	Jasa Lainnya	446,13	487,67	535,74	585,29	544,73
<b>PDRB KABUPATEN MAGELANG</b>		<b>19 882,24</b>	<b>20 974,80</b>	<b>22 082,80</b>	<b>23 253,15</b>	<b>22 861,47</b>

Catatan :

\*) angka sementara

\*\*) angka sangat sementara

Sumber : BPS Kabupaten Magelang

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Magelang pada tahun 2020 melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dipengaruhi

oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Magelang tahun 2020 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 22,86 triliun rupiah. Angka tersebut turun dari 23,25 triliun rupiah pada tahun 2019. Dengan kata lain selama tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi sebesar 1,68 persen.

Sepuluh lapangan usaha mengalami kontraksi dan hanya tujuh lapangan usaha mengalami pertumbuhan. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi terdalam, yaitu sebesar 22,99 persen. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 selama tahun 2020 yaitu *Work From Home* (bekerja dari rumah), *Study From Home* (sekolah dari rumah), pelarangan mudik dan sebagainya menekan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang bergantung pada mobilitas masyarakat.

Lapangan usaha lain yang juga mengalami kontraksi cukup dalam meliputi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang terkontraksi sebesar 8,00 persen; lapangan usaha jasa perusahaan yang terkontraksi sebesar 7,12 persen; serta lapangan usaha jasa lainnya yang terkontraksi sebesar 6,93. Dari tujuh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan, hanya lapangan dipengaruhi oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi.

### **Keuangan Daerah**

Salah satu elemen penting dalam proses pembangunan daerah adalah ketersediaan anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit penghasil pendapatan daerah. Pendapatan daerah di Kabupaten Magelang diupayakan ada kenaikan setiap tahun.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Perkembangan realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Magelang dalam lima tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat sebagai berikut :

## Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang, Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
<b>PENDAPATAN (Rp)</b>	<b>2.036.310.089.428,00</b>	<b>2.271.336.015.858,00</b>	<b>2.302.190.543.616,00</b>	<b>2.575.439.825.755,00</b>	<b>2.380.457.680.604,00</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)</b>	<b>288.485.678.128,00</b>	<b>403.561.238.310,00</b>	<b>325.089.093.092,00</b>	<b>417.178.099.961,00</b>	<b>329.769.193.224,00</b>
Hasil Pajak Daerah	97.101.522.117,00	112.344.030.430,00	124.444.072.963,00	156.886.789.644,00	115.530.759.532,00
Hasil Retribusi Daerah	15.587.692.390,00	20.445.297.126,00	18.186.191.392,00	22.934.190.849,00	27.049.700.014,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.643.064.538,00	20.805.304.738,00	28.534.358.666,00	23.700.417.768,00	30.637.364.531,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang	158.153.399.083,00	249.966.606.016,00	153.924.470.071,00	213.656.701.700,00	156.551.369.147,00
<b>DANA PERIMBANGAN (Rp)</b>	<b>1.362.306.913.419,00</b>	<b>1.407.243.138.226,00</b>	<b>1.398.132.841.570,00</b>	<b>1.500.585.586.102,00</b>	<b>1.390.679.533.778,00</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50.834.770.009,00	45.499.673.539,00	36.431.591.975,00	28.247.886.437,00	34.364.292.995,00
Dana Alokasi Umum	1.078.981.977.000,00	1.060.027.733.000,00	1.060.540.612.000,00	1.097.366.974.000,00	987.675.947.000,00
Dana Alokasi Khusus	232.490.166.410,00	257.495.109.687,00	301.160.637.595,00	327.189.198.665,00	309.473.831.783,00
Dana Insentif Daerah	0	44.220.622.000,00	0	47.781.527.000,00	59.165.462.000,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>385.517.497.881,00</b>	<b>460.531.639.322,00</b>	<b>578.968.608.954,00</b>	<b>657.676.139.692,00</b>	<b>660.008.953.602,00</b>
Pendapatan Hibah	1.843.163.661,00	3.801.511.675,00	89.457.220.849,00	94.617.667.874,00	110.365.013.575,00
Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	126.190.533.220,00	151.472.357.647,00	154.791.322.105,00	167.256.161.818,00	147.910.429.045,00
Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	30.503.500.000,00	15.643.871.000,00	9.359.234.000,00	12.730.533.000,00	10.689.403.000,00
Dana Desa	226.980.301.000,00	289.613.899.000,00	325.360.832.000,00	383.071.777.000,00	391.044.107.982,00
<b>BELANJA (Rp)</b>	<b>2.073.797.409.332,00</b>	<b>2.451.441.154.742,00</b>	<b>2.486.540.561.169,00</b>	<b>2.568.593.603.007,00</b>	<b>2.216.503.231.411,00</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)</b>	<b>1.375.873.412.336,00</b>	<b>1.440.436.939.257,00</b>	<b>1.469.755.920.226,00</b>	<b>1.600.619.506.377,00</b>	<b>1.592.395.686.291,00</b>
Belanja Pegawai	956.765.652.145,00	862.787.039.594,00	843.116.457.075,00	840.371.055.411,00	793.738.589.629,00
Belanja Hibah	13.632.820.000,00	38.032.365.000,00	55.322.664.784,00	46.064.197.000,00	55.647.760.660,00
Belanja Bantuan Sosial	38.705.455.000,00	41.991.275.000,00	40.944.365.000,00	30.198.609.000,00	10.637.410.000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah	11.487.236.256,00	13.864.123.170,00	15.546.920.254,00	18.900.059.265,00	21.634.541.500,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan	353.508.455.935,00	479.610.746.506,00	513.879.513.113,00	665.011.830.701,00	646.099.419.199,00
Belanja Tidak Terduga	1.773.793.000,00	4.151.389.987,00	946.000.000,00	73.755.000,00	64.637.965.303,00
<b>BELANJA LANGSUNG (Rp)</b>	<b>697.923.996.996,00</b>	<b>1.011.004.215.485,00</b>	<b>1.016.784.640.943,00</b>	<b>967.974.096.630,00</b>	<b>624.107.545.120,00</b>
Belanja Pegawai	63.264.041.605,00	82.845.345.123,00	82.077.962.129,00	77.570.824.535,00	55.373.436.197,00
Belanja Barang dan Jasa	281.492.262.808,00	424.757.302.457,00	432.979.303.553,00	503.873.276.251,00	373.300.317.580,00
Belanja Modal	353.167.692.583,00	503.401.567.905,00	501.727.375.261,00	386.529.995.844,00	195.433.791.343,00

Sumber : BPPKAD Kab. Magelang

Realisasi pendapatan Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2020 sebesar 2.380 milyar rupiah. Sementara, belanja daerah Kabupaten Magelang pada tahun 2020 mencapai 2.216 miliar rupiah. Realisasi pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016–2020

#### 1. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.

Derajat Desentralisasi Kabupaten Magelang 2016-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan	Derajat Desentralisasi (%)
2016	288.485.678.128	2.036.310.089.428	14,17
2017	403.561.238.310	2.271.336.015.858	17,77
2018	325.089.093.092	2.302.190.543.616	14,127
2019	417.178.099.961	2.575.439.825.755	16,19
2020	329.769.193.224	2.380.457.680.604	13,85

Rasio derajat desentralisasi Kabupaten Magelang relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Bila dilakukan rata-rata rasio derajat desentralisasi selama 5 tahun terakhir, maka angka rasio ini mencapai 15,56%. Ini menunjukkan bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan total Penerimaan Daerah.



## 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Propinsi dan Pinjaman}}$$

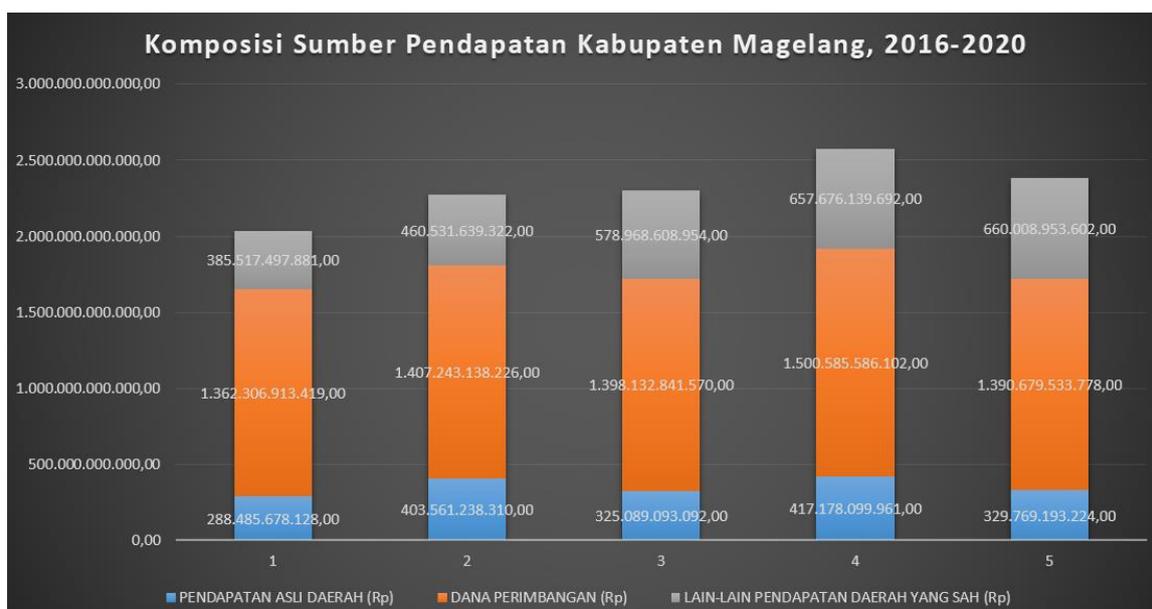
Berikut ini hasil analisis rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magelang berdasarkan Laporan Realisasi Kabupaten Magelang Tahun 2016– 2020

Rasio Kemandirian Kabupaten Magelang, 2016-2020

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
2016	16,52	Instruktif
2017	21,65	Instruktif
2018	17,22	Instruktif
2019	20,21	Instruktif
2020	17,00	Instruktif
Rata-rata	18,52	Instruktif

Berdasarkan perhitungan rasio Kemandirian Keuangan Daerah diatas bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Magelang dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2016–2020 cukup mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2020, rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Magelang masih menunjukkan pola hubungan yang instruktif. Pola hubungan instruktif menunjukkan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, artinya daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Pola instruktif tersebut membuat ketergantungan pemerintah Kabupaten Magelang dari sisi finansial terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Dari grafik terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer mengalami peningkatan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Namun, bila dibandingkan antara jumlah pendapatan asli daerah dan jumlah pendapatan transfer, pendapatan transfer masih mendominasi komponen pendapatan daerah secara keseluruhan.

Realisasi Komponen Pendapatan Kabupaten Magelang, 2016-2020



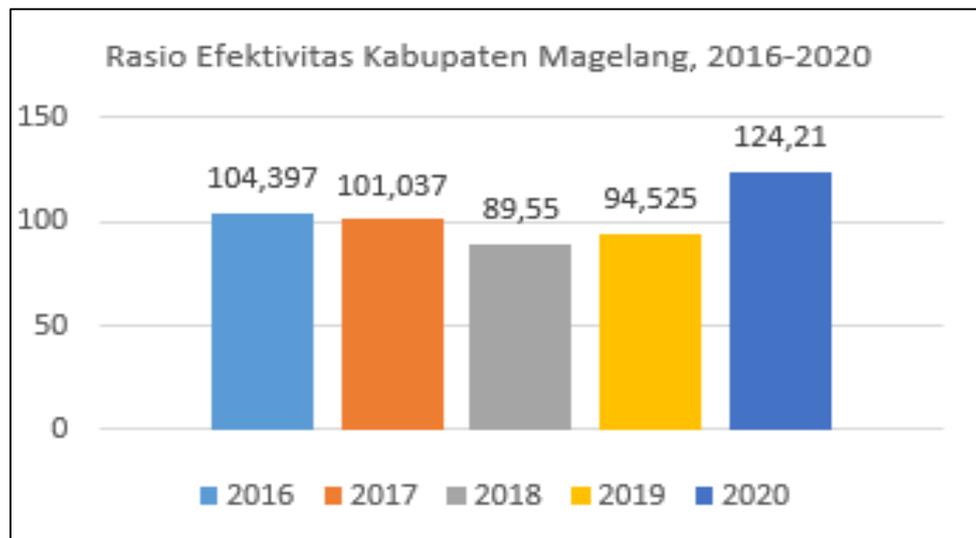
### 3. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (Rasio EKD) menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Dari perhitungan rasio EKD, dalam lima tahun terakhir diperoleh nilai rata-rata rasio EKD sebesar 97.37 artinya target PAD yang ditetapkan belum dapat direalisasikan secara maksimal oleh Pemerintah Daerah. Berikut rasio efektivitas dalam lima tahun terakhir:

Rasio Efektivitas Kabupaten Magelang, 2016-2020

Tahun	Penerimaan PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas (%)	Pola Hubungan
2016	288.485.678.128	276.334.438.862	104,397	Efektif
2017	403.561.238.310	399.425.826.000	101,037	Efektif
2018	325.089.093.092	363.038.862.200	89,55	Tidak Efektif
2019	417.178.099.961	441.347.020.000	94,525	Tidak Efektif
2020	329.769.193.224	265.502.524.500	124,21	Efektif

Berikut adalah grafik yang memperlihatkan rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Magelang dari tahun 2016–2020.



#### 4. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja langsung atau belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas) sedangkan belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Menurut Mahmudi (2010) semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung.

Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung,  
Kabupaten Magelang, 2016-2020

Tahun	Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja (%)	Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja (%)
2016	66,35	33,65
2017	58,76	41,24
2018	59,11	40,89
2019	62,32	37,68
2020	69,10	30,90

Dilihat dari tabel diatas, terlihat bahwa rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja masih lebih besar dibandingkan rasio belanja langsung terhadap total belanja. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Magelang masih memprioritaskan anggaran dalam belanja tidak langsung.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode. Secara tren, terlihat bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang menunjukkan pertumbuhan meski pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pertumbuhan Pendapatan Daerah yang tertinggi ada pada tahun 2019 yaitu sebesar 11,87% dan mengalami penurunan pertumbuhan di tahun 2020 sebesar 0.08%

Hasil Analisis Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Magelang  
Tahun Anggaran 2010-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung
2016	10,29	4,64	14,89	27,54
2017	39,89	11,54	4,69	44,86
2018	-19,44	1,36	2,04	0,57
2019	28,33	11,87	8,90	-4,80
2020	-0,21	-0,08	-0,005	-0,26

Demikian pula dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang pertumbuhan berada pada tahun 2019 yaitu sebesar 28.33% sementara itu terjadi penurunan pertumbuhan di tahun 2020 sebesar 0,21%.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari rasio kemandirian keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang masih menunjukkan pola hubungan yang instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, artinya daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial.
2. Pemerintah Kabupaten Magelang belum dapat memaksimalkan secara efektif dalam pengelolaan target Pendapatan Asli Daerah.
3. Dalam lima tahun terakhir, alokasi anggaran belanja tidak langsung masih lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung.

## SARAN

Melihat permasalahan yang ada dan dengan memperhatikan hasil dari analisis terhadap rasio pengelolaan keuangan terhadap APBD Kabupaten Magelang, maka saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Magelang harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada.
2. Pemerintah Kabupaten Magelang harus menyusun strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi, diantaranya dilakukan dengan memperbaiki aspek kelembagaan/pengelolaan pendapatan asli daerah, peningkatan jumlah wajib pajak, penciptaan sumber-sumber pendapatan baru dan kebijakan di bidang investasi
3. Pemerintah Kabupaten Magelang perlu meningkatkan pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana umum untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Magelang dan untuk menarik investor mengembangkan usahanya di wilayah Kabupaten Magelang.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang. *Kabupaten Magelang Dalam Angka 2019*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang. *Kabupaten Magelang Dalam Angka 2020*. Diambil dari <https://magelangkab.bps.go.id/>

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, *Ringkasan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 s/d 2020*, Diambil dari <http://sibata.magelangkab.go.id/>

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : CV Andi Offset

Mahmudi, 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi, Yogyakarta

Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, edisi revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana Prenamedia Group